

Urgensi Pendidikan Sistem Ekonomi Islam Sejak Dini

Eddy Iskandar

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan
Jalan KL. Yos Sudarso No. 224 Medan – Sumatera Utara
e-mail: e.iskandar88@gmail.com

Abstrak

Perekonomian Islam sukses membuktikan peranannya bertahan di tengah pusaran krisis. Karena itu, perekonomian syariah dinilai tepat untuk mengatasi dampak pengaruh krisis global. Salah satu tugas Perguruan Tinggi Islam ialah ikut mengubah cara pandang masyarakat agar lebih *melek* tentang ekonomi syariah. Metode dakwah dan syiar tentang ekonomi dan perbankan Islam adalah salah satu yang paling diandalkan saat ini. Selain itu, kolaborasi peran ulama dan pemerintah dapat menjadi hal krusial jika pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat memasukkan materi pelajaran ekonomi dan perbankan Islam di sekolah sejak tingkat dasar. Terlebih mengenai penekanan larangan dan bahaya riba di dalam mata pelajaran Agama Islam yang dianggap masih sangat minim. Selain itu, peran ulama sebagai penyebar ilmu agama juga harus dimaksimalkan dengan pembekalan ilmu ekonomi dan perbankan Islam yang cukup. Sehingga keraguan yang muncul dalam hati masyarakat bisa diobati dengan pemahaman sang ulama yang dapat menjelaskan bahaya riba secara ekonomi dengan baik. Ulama juga diharapkan dapat menjawab solusi dari pelarangan riba, yaitu menggunakan akad-akad kerjasama investasi seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga masyarakat tidak ragu untuk meninggalkan produk-produk yang berbasis bunga.

Kata Kunci: Pendidikan, ekonomi Islam, Sejak Dini.

Pendahuluan

Ekonomi merupakan sebuah aktifitas dasar manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di dunia ini. Melakukan apa saja yang dianggap mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terlayani dengan maksimal. Pelayanan kebutuhan ini pun terus berkembang bukan hanya jenis pelayanan dari variasi kebutuhan, tapi juga kualitas pemenuhan kebutuhan itu sendiri.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, oleh karena itu Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif.

Ekonomi Islam adalah cara hidup manusia yang serba berkecukupan, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep *hablum min-Allah wa hablum min-Annas*, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya (tauhidi).

Salah satu problematika mendasar yang dihadapi oleh para pakar maupun praktisi ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah Islamiyyah.

Merealisasikan pendidikan ekonomi syariah pada tingkat sejak dini amatlah perlu dikarenakan proses internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas hidup akan lebih efektif jika diajarkan lebih dini. Hal ini dikarenakan proses belajar tidaklah hanya *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*. Dalam jenjang Sekolah saat ini pendidikan ekonomi masih didominasi oleh worldview dan muatan ideologi kapitalisme. Dan hal ini yang menjadi akar kerusakan yang dahsyat dalam perekonomian dan ini tentunya membutuhkan sebuah perubahan yang serius dan fundamental.

Kajian Teori

Urgensi pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

1. Islam sebagai the way of life

Dhani (2012:7) menyatakan bahwa adanya kebutuhan masyarakat melaksanakan kegiatan penyediaan barang produksi, saluran distribusi, transaksi keuangan, pemenuhan kebutuhan dan kegiatan ekonomika lainnya telah sesuai dengan prinsip Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ekonomi Islam membahas dan mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Falah).

Falah atau kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang berdasarkan kemaslahatan (mashlahah). Menurut As-Shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nash), dan material (maal).

2. Islam sebagai rahmatan lil alamin

Ekonomi Islam mengalokasikan dan mengelola sumber daya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al Qur'an dan Sunnah untuk mencapai Falah. Falah atau kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang berdasarkan kemaslahatan (mashlahah). Islam dan Muslim hidup dalam suatu lingkungan ekologi dan ekonomi yang berdampingan, antar suku, antar agama, antar bangsa, antar negara, antar regional, dan komunitas global yang saling membutuhkan satu sama lain.

3. Manfaat Makro dan Mikro

- a. Ekonomi Islam: melarang aktifitas ribawi, untung-untungan atau spekulasi (maysir), ketidakjelasan dalam transaksi (gharar), menimbulkan maksiat, suap (riyswah), keadilan, keseimbangan, dan ukhuwah.
- b. Ekonomi Islam: mendorong adanya kemaslahatan agama (dien), jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nash), dan material (maal).
- c. Ekonomi Islam: menciptakan insan pelaku ekonomi dan bisnis yang profesional dan good governance secara intelektual dan akhlak.
- d. Ekonomi Islam: menyadarkan insan pelaku ekonomi dan bisnis bahwa harta benda dan kekayaan bentuk lainnya adalah amanah bukan hak milik mutlak.
- e. Ekonomi Islam: mendorong kegiatan yang produktif dan berorientasi sektor riil.

- f. Bagian terbesar dari ekonomi Islam adalah perbankan Islam yang secara struktur dan operasional memiliki daya tahan terhadap krisis dan gejolak perekonomian.

Peran Urgensi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dianggap lebih memungkinkan untuk mengatasi problemaekonomi di bandingkan dengan ekonomi ribawi yang sering menciptakan uang tanpamemerhatikan apakah uang itu disalurkan pada sektor-sektor produktif atau tidak. Implikasi dari usaha ini, menciptakan uang dan kemudian menyalurkan pada sektor-sektor produktif, adalah akan mendorong naiknya tingkat produktivitas ekonomisehingga, pada gilirannya, akan meningkatkan jumlah produk dan jasa yang tersedia dalam masyarakat.

Melihat permasalahan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam sudut pandang ekonomi global serta ekonomi Islam yang akan di ulas dalam makalah ini. Penulis akan membahas masalah pada pertumbuhan ekonomi dan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhinya.

Dari ketiga sistem ekonomi yang ada yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran, pada masa kini perekonomian global lebih mengarah ke sistem ekonomi kapitalis karena telah mengarah pada ciri-ciri kapitalis. Alasan yang mendasari adalah pihak swasta diberikan kebebasan yang sebesar besarnya untuk mengembangkan dan memperluas usahanya tanpa dibatasi pemerintah. Dalam sudut pandang yang lain, orang yang mempunyai modal dapat melakukan apa saja, dengan kata lain uang adalah segalanya.

Fakta menunjukkan bahwa yang menguasai dunia adalah orang-orang yang memiliki banyak uang, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Itulah sisi terburuk dan terkejam dari system global yang kapitalis. Selain itu eksploitasi sumber daya alam yang sebesar-besarnya tanpamemikirkan efek jangka panjang merupakan ciri sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis hanya mengejar keuntungan saja. Sistem ekonomi mengalami perkembangan, mulai dari sistem ekonomitradisional, modern hingga kapitalis pada zaman sekarang.

Perkembangan itu dipengaruhi oleh pola pikir manusia yang semakin lama semakin bebas dan tidak mau dibatasi, sama seperti kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Manusia semakin ingin untuk terlepas dari aturan-aturan pemerintah, oleh sebab itu sistem kapitalis mengalami perkembangan yang pesat. Sebagian besar negara di seluruh dunia menggunakan sistem ekonomikapitalis, sekalipun negara tersebut mengatakan bahwa sistem ekonominya adalah campuran, namun faktanya menggunakan sistem ekonomi kapitalis.

Tujuan sistem perekonomian Islami, seperti halnya sistem ekonomi lainnya, adalah perwujudan efisiensi dan keadilan dalam alokasi serta pendistribusian sumber daya dimana ia juga mengakui peran kekuatan pasar dan kebebasan individu. Akan tetapi ia juga mengakui kemungkinan dampak yang merugikan dari pasar yang benar-benar tidak diatur pada berbagai macam lapisan masyarakat, khususnya yang miskin dan lemah.

Perbedaan antara Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah bahwa ekonomi Islam didasari oleh nilai-nilai yang Islami dan berlaku universal. Penerapan syariah dalam bidang ekonomi akan membuat keadaan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan. Jika dicermati, maka terlihat adanya 2 hal yang menjadi tuntunan Islam dalam kehidupan di dunia yaitu : pertama, menjaga hubungan 2 arah, arah vertikal dan arah horizontal. Arah vertikal adalah arah dengan Allah Swt. (hablum min Allah) dan horizontal dengan sesama manusia (hablum min an-nas). Hubungan vertikal dengan Allah Swt. akan menjadi mekanisme yang menubuh yang dapat mengendalikan perilaku manusia dalam menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan makhluk-makhluk lainnya.

Kedua, bahwa ajaran Islam pada dasarnya ditujukan pada individu, sehingga dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi terlebih dahulu perilaku individu perlu dibenahi. Perilaku yang menerima syariah dan

menyatu pada diri individu menyebabkan apapun posisi dan peran yang dipegangnya akan berjalan dengan norma yang islami. Jadi sebagai konsumen Ia tidak akan mengonsumsi secara berlebihan, sebagai produsen Ia tidak akan berusaha dalam bidang-bidang yang dilarang, sebagai penguasa Ia akan mendahulukan kepentingan umum dan senantiasa mengutamakan keadilan.

Perbedaan dalam bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (ribawi) akan tetapi menggunakan prinsip dasar syariah islam. Beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional:

1. Dalam penyaluran investasi bank syariah hanya menyalurkan dalam investasi halal. Perusahaan yang bekerja sama dengan bank syariah harus perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Sebaliknya bank konvensional tidak memerhatikan kehalalan investasinya.
2. Menggunakan sistem bagi hasil, jika investor mendapat keuntungan yang besar maka bank syariah juga mendapatkan hasil yang sama besar. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga.
3. Jika terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan dengan prinsip dasar syariah seperti musyawarah. Jika Bank konvensional akan menyelesaikan permasalahan atau sengketanya di pengadilan negeri setempat.

Pembahasan

Kagagalan Ekonomi Kapitalis dan Munculnya Mazhab Positif Ekonomi

Kegagalan ilmu konvensional kapitalis dalam menciptakan keadilan sosial dan menyelesaikan persoalan manusia sudah tidak terbantah. (Khursid Ahmad dalam Umer Chapra, 2001: xvii). Secara internasional hal itu dapat disimak melalui buku *The Death of Economics* karya Ormerod (1998), atau melalui buku *Economics as Religion* karya Nelson (2001). Sedangkan secara nasional, hal itu dapat disimak melalui buku *Ekspose Ekonomika* karya Sri-Edi Swasono (2005). Sesuatu yang menggembirakan adalah bahwa telah terjadi perkembangan yang positif dalam ilmu ekonomi, di mana banyak pakar ekonomi telah melakukan kritik tajam terhadap kegagalan ilmu ekonomi konvensional kapitalis dan

menyumbangkan pemikirannya dengan mengemukakan ide-ide yang mengarah kepada perbaikan paradigma ilmu ekonomi menuju yang lebih baik, yaitu perhatian terhadap nilai-nilai moral, etik, dan keadilan sosial.

Misalnya dikemukakan oleh Thomas Friedman ketika diadakan konferensi Davos, Agustus 1997 yang menghimpun para pemimpin dari seluruh dunia. Ia mengatakan yang artinya: “Serangan terhadap mereka yang akan membangun dunia pada basis satu dimensi, di mana perdagangan adalah segalanya, di mana hanya perhitungan-perhitungan finansial saja yang perlu, dengan mudah akan menemui serangan moral potensial terhadap globalisasi”. (Khursid Ahmad dalam Umer Chapra, 2001: xvii).

Amitai Etzioni (1988: ix-x) menyatakan bahwa paradigma ilmu ekonomi neoklasik pada hakikatnya tidak hanya mengabaikan dimensi moral, tetapi juga menolak dimasukkannya moral ke dalam paradigmanya. Oleh karena itu perlu ada paradigma baru dalam ilmu ekonomi yaitu perlunya dimasukkan nilai-nilai moral, karena hanya dengan cara itulah memungkinkan untuk mencari mana yang benar dan mana yang menyenangkan.

Christofam Buarque (1993: xi), menyatakan bahwa kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangannya terletak kepada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika. Didin Hafidhuddin (2002: 67) menjelaskan bahwa tujuan sosial telah dikesampingkan dan dipandang sebagai konsekuensi dari kemajuan teknik daripada sebagai tujuan peradaban. Sementara itu, nilai-nilai etika telah dipinggirkan. Christofam Buarque (1993: xii), Perlu ada suatu perubahan fundamental dalam pendekatan, penyusunan kembali prioritas-prioritas secara total. Pendekatan yang dimaksudkan yaitu:

1. suatu etika untuk melakukan redefinisi tentang tujuan peradaban.
2. suatu definisi baru tentang sasaran dan area kajian
3. suatu landasan baru bagi ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin.

Timothy Gorringer (1999: 31) menyatakan bahwa mereduksi manusia yang *homo sapiens* (makhluk bijaksana) dengan hanya *homo economicus* yang secara rasional memaksimalkan utiliti, bertindak berasas *self interest* saja merupakan

reduksi yang sangat telak terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu perlu didirikan mahkamah international untuk keadilan ekonomi.

Clive Hamilton (1994: 6-7) mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi berkait dan bersepakat dengan kehidupan manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang berperasaan selain berakal, oleh karena itu ekonomi modern yang mengabaikan perasaan (moral/etika) dan *spirituality* merupakan kesalahan yang sangat telak. Memahami sesuatu dengan hanya berasaskan akal semata merupakan pemahaman yang tidak lengkap.

Sementara Kurt W. Rothschild (1993: 152) memberikan salah satu metode penyelesaian problem etika dalam ekonomi. Beliau menyatakan bahwa *fairness* (sebagai salah satu kategori etika) dapat menjadi jembatan penghubung antara keadilan dan efisiensi dalam ilmu ekonomi. Walaupun mungkin akan terjadi penyimpangan yang sedikit dari yang diidealkan, akan tetapi konflik dasar antara nilai-nilai etika dan ekonomi hanya dapat didamaikan dengan baik melalui cara ini.

Lain halnya dengan Edward E. Zajac (1995), dalam buku *Political Economy of Fairness*, beliau menjelaskan beberapa teori keadilan ekonomi baik yang bersifat normatif maupun positif ekonomi seperti *John Rawls' Theory of Justice*, *Robert Nozick Theory of superfairness* (normatif) dan *Perceived Economic Justice in Public Utility Regulation* (positif) dan sebagainya. Perbincangan dalam buku ini selalu mengkaitkan antara makro dan mikro ekonomi, karena sumber persoalan moral dalam ekonomi, di antaranya karena tidak mesranya *link* antara makro dan mikro ekonomi. Ini seperti telah banyak dikritik tentang pembagian makro dan mikro itu tidak tuntas.

M.B. Hendrie Anto (2003: 16) menjelaskna bahwa sehubungan dengan banyaknya kritik terhadap ekonomi konvensional kapitalistik, saat ini telah muncul berbagai mazhab ekonomi positif kritis, diantaranya:

1. *Grant Economics* yang menyatakan bahwa perilaku *altruistic* tidak mesti dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap rasionaliti. Perlu ada integrasi antara *self interest* dan *altruisme*. Menyamakan atau menyederhanakan

perilaku rasional hanya dengan mementingkan diri sendiri adalah tidak realistis.

2. Ekonomi *humanistic* yang menekankan perlunya pembentukan asas-asas humanismenya untuk mendorong kesejahteraan manusia dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Mazhab ini tidak menganut utilitarianisme kuno tetapi psikologi *humanistic*.
3. Ilmu ekonomi sosial yang mencakup usaha untuk revolusi teori ekonomi dipadukan dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Menurut Amartya Sen (2001), menjauhkan ilmu ekonomi dari etika berarti telah mengerdilkan ilmu ekonomi *welfare* dan juga melemahkan basis deskriptif dan prediktif ilmu ekonomi. Hausman, salah satu pendukung paham ini, suatu perekonomian yang secara aktif melakukan kritik diri sendiri dengan aspek-aspek moral akan menjadi lebih menarik, lebih bersinar, dan lebih bermanfaat.
4. Ilmu ekonomi institusional yang beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang saling berkaitan seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama.

Menurut Umar Chapra (2001: 33) revolusi ilmiah dalam ekonomi konvensional tidak komplit sehingga menyebabkan tiadanya mata rantai yang tegas antara mikroekonomi dan makroekonomi. Kurangnya mata rantai penghubung antara makroekonomi dan mikroekonomi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para ahli ekonomi. Justeru dalam kenyataannya seakan-akan terjadi pertentangan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Analisis mikroekonomi yang didasarkan kepada kebebasan individu berlebihan memberi perhatian lebih kepada efisiensi dengan *pareto*, tetapi tidak memperhatikan realisasi tujuan-tujuan makroekonomi yang didasarkan kepada pandangan dunia agama, yang menuntut pengekangan kepentingan diri sendiri.

Dalam konteks problem tersebut, nilai-nilai moral/etika mempunyai kemampuan membantu tugas ini, karena ia bisa dipergunakan untuk menciptakan keharmonisan sosial dengan cara mereduksi kesenjangan antara kepentingan individu dan sosial dalam mendorong penggunaan sumber-sumber daya langka selaras dengan keperluan untuk mewujudkan tujuan. (Rustam Effendi: 2003).

Menurut Umar Chapra (2001: 33), pasar tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas itu. Pasar perlu dilengkapi dengan nilai-nilai moral yang membantu mengarahkan preferensi individu supaya selaras dengan tujuan-tujuan *humanitarian*. Tujuan yang sedemikian, sulit dicapai tanpa adanya reformasi pada tingkat individu dan sosial yang seirama dengan nilai-nilai moral.

Persoalannya adalah darimana nilai-nilai moral dalam ekonomi itu diambil, agar siapapun yang melanggarnya dapat dihukum. Apakah ekonomi sosial dan beberapa mazhab positif lainnya dapat menyediakannya? Apakah dari moralitas sosial? Mungkin jawabannya adalah tidak. Karena moralitas sosial bergantung kepada standar yang disepakatai sebagai konsensus yang diterima sebagai aksioma yang hampir tidak bisa didiskusikan lagi. Utilitarianisme dan kontrak sosial tidak mempunyai potensi dapat menyediakan nilai-nilai yang diterima oleh semua orang.

Oleh karena itu, perbincangan tentang sumber nilai ini membawa kepada satu pembahasan tentang ekonomi Islam, baik yang berhubungan dengan paradigma, tujuan dan metode. Ini bukan bermakna akan menghapus teori-teori dan karya yang *sophisticated* dalam ekonomi konvensional, akan tetapi menyempurnakan revolusi ilmiah yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Kenapa ekonomi Islam? Jawaban ringkasnya karena peluang untuk menciptakan suatu konsensus dalam dunia muslim lebih besar jika bahasan masalah dilakukan dalam kerangka pandangan dunia Islam. (Umar Chapra: 2001: 44)

Startegi Pendidikan Sistem Ekonomi Islam Sejak Dini

Sistem perekonomian Islam sukses membuktikan peranannya bertahan di tengah pusaran krisis. Karena itu, perekonomian syariah dinilai tepat untuk mengatasi dampak pengaruh krisis global. Sistem ini tidak berjarak dari sistem riil sehingga terhindar dari aksi spekulasi yang acap menimbulkan gejolak pada sistem keuangan dunia. Sehingga perlu ada perhatian oleh semua pihak baik pemerintah lewat regulasinya, akademisi dan praktisi untuk duduk bersama memikirkan agar masyarakat yang selama ini belum terjangkau dapat ikut merasakan manfaat perbankan syariah.

Tugas Perguruan Tinggi Islam untuk memerhatikan dan ikut mengubah cara pandang masyarakat agar lebih *melek* tentang ekonomi syariah. Metode dakwah dan syiar tentang ekonomi dan perbankan islam adalah salah satu yang paling diandalkan saat ini. Selain itu, kolaborasi peran ulama dan pemerintah dapat menjadi hal krusial jika pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat memasukkan materi pelajaran ekonomi dan perbankan islam di sekolah sejak tingkat dasar. Terlebih mengenai penekanan larangan dan bahaya riba di dalam mata pelajaran Agama Islam yang dianggap masih sangat minim. Menurut pengalaman penulis, tidak seperti pemahaman tentang larangan memakan makanan haram seperti daging babi, darah, khamr, dll, Atau larangan berjudi, mencuri sampai kepada dosa-dosa besar yaitu musyrik dan berzina, yang sudah mandarah daging, dalam mata pelajaran Agama Islam jarang sekali bahkan hampir tidak pernah membahas tentang larangan riba. Padahal Rasulullah saw. bersabda:

“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi dalam *Syu’abul Iman*. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih dilihat dari jalur lainnya*).

Dari hadits diatas dikatakan sungguh besar dosa orang yang melakukan riba sampai yang paling ringan yaitu sama seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Hal ini mengherankan karena dalam pelajaran agama Islam yang penulis sendiri dapatkan, sangat jarang materi tentang riba dan pelarangannya dibahas. Bahkan sampai saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum tahu apa itu riba, tidak mengetahui bahwa riba itu haram, bahkan tidak tahu contoh dari riba adalah bunga di bank. Harus disadari pentingnya pendidikan tentang ekonomi dan perbankan Islam sejak dini, karena salah satu yang menjadi sebab utama dari kerusakan yang ditimbulkan riba adalah karena ketentuan mengenai keharaman riba tidak ditanamkan sejak dini. Jangankan yang belum mengetahui, masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui apa itu riba, pelarangan, dan dosa riba, banyak yang masih memaklumi riba karena dianggap sama-sama menguntungkan kedua

pihak. Padahal telah disebutkan di Alquran bisa jadi sesuatu yang dianggap baik oleh manusia ternyata buruk baginya dan sebaliknya. Sehingga tugas kita sebagai hamba Allah untuk tetap melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Selain itu, peran ulama sebagai penyebar ilmu agama juga harus dimaksimalkan dengan pembekalan ilmu ekonomi dan perbankan Islam yang cukup. Sehingga keragu-raguan yang muncul dalam hati masyarakat bisa diobati dengan pemahaman sang ulama yang dapat menjelaskan bahaya riba secara ekonomi dengan baik. Ulama juga diharapkan dapat menjawab solusi dari pelarangan riba, yaitu menggunakan akad-akad kerjasama investasi seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga masyarakat tidak ragu untuk meninggalkan produk-produk yang berbasis bunga.

Atas uraian di atas, dapat saya simpulkan bahwasanya selain perbaikan produk dari ekonomi dan perbankan Islam, perbaikan subjek atau konsumen dari ekonomi dan perbankan islam juga harus diperhatikan. Kedua tugas ini bisa dilakukan secara bersamaan jika tercipta kerjasama dari berbagai pihak terkait, yaitu pihak pemerintah khususnya melalui Dinas Pendidikan dengan alim ulama yang berperan dalam perbaikan sudut pandang serta moral bangsa.

Penutup

Tugas Perguruan Tinggi Islam untuk memerhatikan dan ikut mengubah cara pandang masyarakat agar lebih *melek* tentang ekonomi syariah. Metode dakwah dan syiar tentang ekonomi dan perbankan Islam adalah salah satu yang paling diandalkan saat ini. Selain itu, kolaborasi peran ulama dan pemerintah dapat menjadi hal krusial jika pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat memasukkan materi pelajaran ekonomi dan perbankan islam di sekolah sejak tingkat dasar.

Peran ulama sebagai penyebar ilmu agama juga harus dimaksimalkan dengan pembekalan ilmu ekonomi dan perbankan Islam yang cukup. Sehingga keragu-raguan yang muncul dalam hati masyarakat bisa diobati dengan pemahaman sang ulama yang dapat menjelaskan bahaya riba secara ekonomi dengan baik. Ulama juga diharapkan dapat menjawab solusi dari pelarangan riba,

yaitu menggunakan akad-akad kerjasama investasi seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga masyarakat tidak ragu untuk meninggalkan produk-produk yang berbasis bunga.

Daftar Pustaka

- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Amitay Etzioni. 1988. *The Moral Dimension: Towards a New Economics* (New York: McMillan, h. ix-x.
- Christofam Buarque. 1993. *The End of Economics: Ethics and Disorder of Progress*. London, Zed Books.
- Clive Hamilton. 1994. *The Mystic Economist*. Australia: Hamilton.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Edward E. Zajac. 1995. *Political Economy of Fairness*. London: MIT Press
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Khursid Ahmad (2001), "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Kurt W. Rothschild. 1993. *Ethics and Economic Theory*. Cambridge: Edward Elgar.
- Masudul Alam C. 1989. *The Paradigm of Humanomics*. Bangi: UKM.
- M.B. Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Mubyarto. 2002. "Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia" dalam Jurnal Ekonomi Pancasila, Th. I - No. 1 - Maret 2002, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_4.htm
- Riyadi, Abdul Kadir. Dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Rustam Effendi. 2003. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Timothy Gorringer. 1999. *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*. Slovenia: Thames & Hudson.
- Umer Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, h. 33